
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS OPERASI MILITER SELAIN PERANG
DI YON MARHANLAN III DALAM PENAGGULANGAN BANJIR JAKARTA****Oleh****Tony Kurniawan¹, Edi Suhardono², Budi Rianto³, Sudirman⁴, Sri Umiyati⁵**
^{1,2,3,4,5}Universitas Hang Tuah Surabaya**Jl Arief Rachman Hakim No 150 Sukolilo, Kota Surabaya 60111 Jawa Timur****Email: ¹tony_kurniawan96@yahoo.co.id****Abstrak**

Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan III/Jakarta atau Yonmarhanlan III/Jakarta adalah satuan pelaksana Pasukan Marinir III yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pertahanan Pangkalan TNI AL serta melaksanakan tugas-tugas lain seperti tugas OMSP dalam rangka mendukung tugas pokok Lantamal III/ Kota Jakarta. Sebagai contoh Potensi bencana yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta yaitu banjir, terdapat 19 titik rawan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Provinsi DKI Jakarta bila banjir datang akan menggenangi wilayah tersebut. Penanganan yang sistematis dari semua instansi dan lembaga terkait termasuk peran Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) seperti Lantamal III melalui Yonharhanlan Jakarta sangat diperlukan dalam rangka menciptakan daerah bebas banjir serta ancaman bencana alam lainnya. Jenis metode penelitian Implementasi Kebijakan Tugas Operasi Militer Selain Perang Di Yonmarhanlan III dalam Penanggulangan Banjir Jakarta yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Selanjutnya dijelaskan oleh bahwa pengumpulan oleh peneliti diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara dan gabungan/triangularisasi. Hasil penelitian ini adalah (1) Yonmarhanlan III Jakarta merupakan salah satu satuan pelaksana yang berada dibawah TNI AL. Dalam pelaksanaan program-program kerja sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) dengan sasaran menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal Yonmarhanlan III Jakarta, BNPB dan BPBD serta meningkatnya kapasitas entitas penanganan bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OMSP dalam penanggulangan banjir di Provinsi DKI Jakarta. (2) Berdasarkan semua pernyataan ke tiga (3) informan dari pihak sipil dan militer di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung Kerjasama sipil dan militer dalam manajemen penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta: (a) Sinergitas dan kerjasama entitas sipil dan militer yang semakin solid dan tanggap dalam bencana banjir. (b) Pemberdayaan sumberdaya Manusia seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan SDM di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tentang sinergitas dalam penanggulangan banjir. (c) Pendampingan misalnya perlindungan masyarakat dari dampak bencana dan pemulihan kondisi dari dampak bencana serta adanya pendampingan sosial bagi korban bencana banjir. Berdasarkan pernyataan diatas menjadi faktor penghambat dalam manajemen bencana.. Peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan semua pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat Kerjasama sipil dan militer dalam penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta: (a) Komunikasi dan koordinasi antara entitas sipil dan militer (b) kendala anggaran dan operasional masih menggunakan sarana/ prasarana tempur (c) Terbatas sarana angkut dan personil yang mengoperasikannya (d) pelatihan saat ini masih bersifat OMP belum dilatih simulasi OMSP penanganan bencana secara khusus serta belum optimal karena dilakukan secara umum dan bukan spesifik terkait kerawanan bencana di setiap daerah. Saran yang disampaikan (1) Untuk menyediakan anggaran khusus yang digunakan untuk mendanai aktifitas OMSP oleh Yonmarhanlan III dalam penanggulangan bencana

banjir di Provinsi DKI Jakarta. (2) BNPB, BPBD dan Yonmarhanlan III Jakarta semakin memperkuat sinergitas dengan melaksanakan pelatihan penanggulangan bersama antara entitas sipil dan militer.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Bencana Banjir, OMSP, Yonmarhanlan III

PENDAHULUAN

Letak geografis Indonesia berada pada garis Khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia berada pada iklim tropis dimana iklim di Indonesia mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang sangat tinggi tersebut dapat menimbulkan dampak terjadinya bencana apabila resapan air tidak berjalan alami atau normal. Banyaknya pembukaan lahan perkebunan secara liar, penebangan pohon yang liar tanpa diimbangi oleh penghijauan yang sinergis dapat mengakibatkan bencana alam diantaranya banjir bandang, tanah longsor. Selain itu iklim tropis yang dimiliki oleh Negara Indonesia pada saat musim kemarau sangat berpotensi menimbulkan kebakaran hutan.

Dampak dari peristiwa-peristiwa bencana alam tersebut banyak menimbulkan kerugian fisik dan non fisik, harta dan benda masyarakat, serta sarana dan prasarana pemerintah yang dapat mempengaruhi situasi dan kondisi di daerah (lokal) dan nasional, terutama berpengaruh kepada sektor; keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan, pendidikan, perekonomian dan kondisi sosial budaya masyarakat. Hal ini sebagaimana yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah DKI Jakarta dan Satuan jajaran TNI, perlu tanggap untuk menyikapi dengan cepat dan secara simultan dampak dari bencana alam tersebut, guna memberikan bantuan penanggulangan kepada masyarakat DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara akibat dari bencana banjir, dengan melakukan tindakan pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, sehingga situasi dan kondisi daerah bencana segera dapat berfungsi normal dan kondusif kembali.

Mitigasi daerah rawan bencana banjir yang terjadi di Ibu Kota Jakarta merupakan salah satu tahapan yang sangat vital dalam manajemen bencana, terutama yang mengakibatkan

lumpuhnya perekonomian. Hal ini dikarenakan wilayah DKI Jakarta khususnya di wilayah Jakarta Utara yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut. Disamping itu wilayah Jakarta Utara juga merupakan daerah yang di melewati aliran sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Kondisi tersebut, secara alamiah memposisikan wilayah DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara memiliki kerawanan yang tinggi terhadap banjir. Berulangnya kejadian banjir per lima tahun menyebabkan banyak kalangan mempercayai sebagai siklus lima tahunan. Sejauh ini, banjir yang terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki cakupan wilayah genangan yang luas, berdasarkan data BPBD DKI dimana genangan air paling banyak akibat banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta terjadi di wilayah Jakarta Utara yaitu sebanyak 19 titik. Peran TNI dalam membantu penanggulangan bencana merupakan wujud partisipasi aktif dan kontribusi nyata dalam proses pembangunan nasional pada khususnya, serta kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini sedang dihadapkan pada berbagai ancaman dan tantangan yang berasal dari alam. Kodim sebagai Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terutama tugas perbantuan penanggulangan bencana perannya sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan tugas ke depan [1].

Tabel 1. Data Banjir DKI Jakarta Tahun 2014 - 2016

Tahun	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Januari	Februari	Januari	Februari	Maret	April	Februari	Maret	Februari	Mei	Maret	April	Januari	Februari
Kecamatan	37	21	15	38	14	18	31	20	24	8	23	17	35	42
Kelurahan	125	45	36	133	32	44	67	40	43	17	43	34	151	167
Rata Rata Ketinggian Air (cm)	10-400 cm	10-300 cm	10-150 cm	10-200 cm	5-300 cm	5-360 cm	10-250 cm	10-160 cm	5-300 cm	10-150 cm	10-100 cm	10-250 cm	5-350	45-200 cm
Jama Genangan (hari)	20	20	2	7	2	2	5	3	1-6	1	2	1	4	1-2
RW Terdampak	634	192	221	615	93	134	216	95	162	47	119	94	390	581
KK Terdampak	70459	56489	6095	64458	16145	7833	6967	3232	5467	214	315	2915	22148	12551
Jiwa Terdampak (orang)	245950	164940	13073	231566	51234	27607	19325	10166	19456	716	1010	8851	83406	43464
Korban Meninggal (orang)	23	-	-	5	-	-	6	-	1	-	-	2	19	6
Korban Hilang (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korban Luka Berat (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Korban Luka Ringan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Jiwa Pengungsi Tertinggi (orang)	122417	38340	3255	41202	2192	20945	5858	1870	15558	69	85	3600	36445	13808
Jumlah Tempat Pengungsian	434	129	59	337	27	40	45	27	60	2	3600	23	269	119
Jumlah Nilai Kerugian	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Curah Hujan Tertinggi	154,1	284	134,3	277,5	n.a	124,5	179,7	n.a	104,6	n.a	130,3	n.a	377	277

Sumber: Pemprov DKI Jakarta, 2020

Tabel 2 Data Curah Hujan Tertinggi Di DKI Jakarta Tahun 2014 – 2020

Keterangan Curah Hujan		
Curah Hujan Tertinggi	Bulan	Tahun
377	Januari	2020
277,5	Februari	2020
130,3	Maret	2019
104,6	Februari	2018
179,7	Februari	2017
124,5	April	2016
147,9	Januari	2015
277,5	Februari	2015
154,1	Januari	2014
284	Februari	2014

Sumber: Pemprov DKI Jakarta, 2020

Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan III/Jakarta atau Yonmarhanlan III/Jakarta adalah satuan pelaksana Pasukan Marinir III yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pertahanan Pangkalan TNI AL serta melaksanakan tugas-tugas lain seperti tugas OMSP dalam rangka mendukung tugas pokok Lantamal III/ Kota Jakarta. Sebagai contoh Potensi bencana yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta yaitu banjir, terdapat 19 titik rawan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Provinsi DKI Jakarta bila banjir datang akan menggenangi wilayah tersebut. Penanganan yang sistematis dari semua instansi dan lembaga terkait termasuk peran Satuan Komando

Kewilayahan (Satkowlil) seperti Lantamal III melalui Yonharhanlan Jakarta sangat diperlukan dalam rangka menciptakan daerah bebas banjir serta ancaman bencana alam lainnya. Dalam kumpulan makalah Sesko TNI (1998:64) dengan tema “Peran TNI Abad XXI“, menjelaskan bahwa peran TNI sejak awal kemerdekaan sampai saat ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembangunan negara dan bangsa. TNI sebagai salah satu komponen bangsa mempunyai tugas untuk mengawal kedaulatan bangsa, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan bangsa dan negara [3].

Secara hukum Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan III/Jakarta atau Yonmarhanlan III/Jakarta memiliki kapasitas dalam kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kegiatan penanggulangan bencana alam. Peran tersebut sudah berjalan cukup lama dan sifatnya bukan bentuk ekspansi, untuk mencampuri atau mengambil alih peran tugas pokok institusi lain, akan tetapi semata-mata merupakan panggilan moral dan fungsional satuan kewilayahan dalam rangka menunaikan “tugas kemitraan ” atau “tugas perbantuan” kepada institusi atau lembaga lain untuk berKerjasama. Sepanjang diperlukan dengan kemampuan dan batas kemampuan TNI sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Akan tetapi kesiapan Yonmarhanlan III/Jakarta dihadapkan pada ancaman bencana alam khususnya banjir yang frekuensinya relatif tinggi, merupakan suatu tantangan berat yang harus dihadapi oleh personel yang harus dihadapi oleh personel Yonmarhanlan III/Jakarta di lapangan [4].

LANDASAN TEORI Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik memang lebih sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya [5]. Dalam

kaitan itu, muda dipahami jika konsep kebijakan itu kemudian sering berkonotasi, serta membawa konsekuensi politis. Dari sinilah lantas diberi makna sebagai tindakan-tindakan politik (political actions). Makna kebijakan tersebut sebagaimana dikemukakan, akan semakin jelas jika diikuti pandangan seorang ilmuan politik. Carl Friedrich, saat ini menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan [6].

Simplementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Dalam buku, *Implementing Public Policy* oleh George Edwards III 1983. Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Kebencanaan dan Mitigasi Bencana

Bencana (risiko/risk) merupakan kombinasi dari 3 komponen, yaitu (1) bahaya (hazard) dapat berupa fenomena alam dan atau aktivitas manusia (2) tingkat kerentanan (vulnerability) masyarakat dalam menghadapi bencana dan (3) risiko yang ditimbulkan. Suatu kejadian dapat disebut dengan bencana apabila tingkat kemampuan dalam menghadapi bencana lebih rendah dibanding dengan tingkat bahaya yang mungkin terjadi. Bahaya dapat menjadi bencana apabila kerentanan yang dimiliki komunitas tinggi atau dalam arti kapasitas dalam

menghadapi bahaya lebih rendah dari tingkat bahaya tersebut .

Menurut Subiyantoro (2010), mitigasi mencakup semua tindakan-tindakan yang diambil sebelum, selama, dan setelah terjadinya peristiwa alam maupun non alam, dalam rangka meminimalkan dampaknya. Tindakan mitigasi meliputi menghindari bahaya, memberikan peringatan, dan evakuasi pada periode sebelum bahaya [9]. Banjir dapat dikategorikan sebagai bencana ketika limpasan debit dari sungai menggenangi dan menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Kerugiannya pun bermacam-macam, mulai dari terganggunya aktivitas warga, timbulnya wabah penyakit akibat genangan hingga terputusnya jalur transportasi darat yang akan berdampak pada sektor perekonomian.

OMSP TNI Dalam Penanggulangan Bencana

OMSP adalah tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) disamping tugas operasi perang. Dalam Undang Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, 2004 disebutkan bahwa OMSP meliputi: (1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata; (2) Mengatasi pemberontakan bersenjata; (3) Mengatasi aksi terorisme; (4) Mengamankan wilayah perbatasan; (5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; (6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; (7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; (8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (9) Membantu tugas pemerintahan di daerah; (10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; (11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; (12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; (13) Membantu pencarian dan

.....
pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta (14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan .

Keterlibatan TNI dalam beberapa tugas OMSP sudah dilembagakan seperti Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Narkotika Nasional (BNN), Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla, sekarang Bakamla) [11]. Di lembaga-lembaga khusus tersebut banyak diperbantukan anggota TNI aktif, mulai dari pangkat terendah hingga Jenderal bintang tiga. Beberapa tugas OMSP lain juga sudah dilakukan oleh TNI secara rutin, seperti penanggulangan bencana alam gempa bumi di donggala pada 2018 dan letusan gunung merapi pada 2010 [12].

Pelaksanaan tugas-tugas OMSP tersebut dipersyaratkan harus berdasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara yang ditetapkan oleh Presiden/Kepala Pemerintah. Dengan kebijakan atau regulasi tersebut, TNI dapat melakukan tugas OMSP secara legal dan Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaannya [13]. Bantuan penggunaan kekuatan TNI dilakukan atas permintaan Kepala Daerah, yaitu bupati/walikota dan gubernur. Kepala Daerah yang mengalami keadaan konflik dalam wilayah masing-masing dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Presiden. Permintaan bantuan penggunaan kekuatan TNI tersebut diputuskan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari panglima komando daerah militer/komandan satuan unsur TNI setempat, kepala kepolisian daerah dan kepala kejaksaan tinggi [14].

Kebijakan Penanggulangan Bencana

UU tentang Pengelolaan Bencana berlaku maka perlu dibuat peraturan perundangan pada tingkat/level di bawah UU tersebut, seperti: Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PerPres), Peraturan Daerah (Perda). Kerangka legislatif ini berperan sebagai rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh semua pihak dan dipakai

.....
sebagai acuan hukum. Pengertian dari kerangka kerja legislatif secara implisit adalah kebijakan tentang bencana yang diterjemahkan dalam aspek hukum [15].

Perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Penyusunan perencanaannya dikoordinasikan oleh Badan baik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) atau BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana [16].

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Implementasi Kebijakan Tugas Operasi Militer Selain Perang Di Yonmarhanlan III dalam Penanggulangan Banjir Jakarta yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus [17]. Pada penelitian ini peneliti dalam memperoleh data yang mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh bahwa pengumpulan oleh peneliti diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara dan gabungan/triangulasi [18]. Teknik ini telah menghasilkan gambaran yang obyektif tentang kebijakan aktifitas Implementasi Kebijakan Tugas Operasi Militer Selain Perang berdasarkan teori yang digunakan, data sekunder serta data primer yang telah di dapatkan didasarkan kepada hasil wawancara terhadap personel yang berkompeten dalam pada Implementasi Kebijakan Tugas Operasi Militer Selain Perang Di Yonmarhanlan III dalam Penanggulangan Banjir Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Tugas OMSP Penanggulangan Banjir Di Yonmarhanlan III Jakarta

Yonmarhanlan III Jakarta yang merupakan pelaksana dalam penanggulangan

bencana di Provinsi Jakarta mempunyai kekuatan dan kemampuan sebagai berikut.

Tabel 3. Kemampuan dan Kekuatan Yonmarhanlan III Jakarta

No	Jenis Kelompok/ Tim	Kontribusi
1	Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR)	1) Melaksanakan pencarian, pengumpulan, pendataan korban bencana secara terus-menerus. 2) Melaksanakan evaluasi dan penyelamatan korban luka-luka maupun meninggal dunia 3) Melaksanakan koordinasi dengan Satlakkes dalam proses evakuasi dan penyelamatan para korban 4) Menyiapkan alat dan peralatan yang dibutuhkan di lapangan untuk evakuasi dan SAR termasuk pengerahannya.
2	Tim Medis dan Evakuasi	1) Menyempurnakan penanganan korban yang telah ditangani. 2) Melaksanakan evakuasi korban sesuai prosedur dan rute evakuasi 3) Selalu berkoordinasi dengan tim SAR. 4) Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya secara terus-menerus. 5) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Dansatgasdalkes.
3	Unsur Tugas Angkut (KAL dan Patkamla)	1) Menyiapkan sarana prasarana untuk pergeseran logistik bahan bantuan 2) Melaksanakan embarkasi dan debarkasi bahan bantuan, tim PBA pemerintah, relawan dari atau ke daerah bencana alam. 3) Melaksanakan pelayaran dengan rute tercepat dan aman. 4) Melaksanakan kegiatan evakuasi kegiatan penanganan PBA

No	Jenis Kelompok/ Tim	Kontribusi
		5) Menyiapkan personil dan material untuk proses pengumpulan data dan analisa untuk mendukung kegiatan penanganan PBA. 6) Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya secara terus-menerus.
5	Tim Pengendalian bahan bangunan	1) Mendata segala kebutuhan bahan bantuan yang diperlukan. 2) Menerima bahan bantuan yang datang dari unsur angkut. 3) Menyalurkan bahan bantuan ke daerah bencana alam sesuai kebutuhan dan skala prioritas.

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan aktivitas Implementasi Kebijakan Tugas Operasi Militer Selain Perang dalam mendukung implementasi penanganan bencana banjir oleh Yonmarhanlan III Jakarta. Namun dalam penelitian ini, berfokus pada apa yang dikembangkan oleh Edward III, bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Faktor Komunikasi, menurut informan saat wawancara mengatakan faktor komunikasi merupakan faktor pertama yang harus diperhatikan secara cermat dalam sinergitas beberapa entitas dalam penanggulangan bencana:

“Komunikasi strategis harus memahami alat untuk menyampaikan pesan dalam menentukan saluran komunikasi yang tepat bagi organisasi adalah hal yang lebih sulit dibanding dengan individu. Paul membagi saluran komunikasi dalam dua bentuk yakni saluran komunikasi lama berupa lisan dan tulisan, serta saluran baru yakni fax, e-mail, voice mail, konferensi web, konferensi video, situs web eksternal, intranet, blog dan situs jejaring sosial. Perkembangan

teknologi yang mengembangkan mekanisme baru penyebaran informasi membuat fungsi Humas berevolusi menjadi kelompok profesional yang membantu organisasi mengirimkan pesan mereka dengan cepat, jujur dan kepada media yang benar” (Wawancara Kolonel Mulyadi Paban V Bakti TNI AL, 7 Juli 2022).

Penentuan alat yang akan digunakan untuk mengkomunikasikan pesan tidak terlepas dari model komunikasi yang diinginkan organisasi. Paul A. Argente menyebutkan model komunikasi organisasi memiliki tujuan yang berbeda, model tersebut adalah *Press Agency*, *Informasi Publik*, *Two-wayasymetris* dan *Two-waysymetris* [19].

Selain keempat model di atas, ada tambahan model komunikasi menggunakan internet menurut informan dalam wawancara:

"Internet bisa menjadi komunikasi satu arah saja bila fungsinya hanya untuk diseminasi informasi, namun bisa juga menjadi alat yang ampuh untuk komunikasi interaktif yang mengedepankan dialog. Komunikasi menggunakan internet bukanlah komunikasi marketing yang massal namun lebih kepada pendekatan tentang manusia sebagai individu yang unik, yang memiliki aspirasi dan kebutuhan, kepentingan dan latar belakang yang berbeda. Pemilihan saluran komunikasi yang tepat serta kecakapan mengelolanya menentukan keberhasilan dalam komunikasi antar beberapa entitas dalam implementasi penanganan bencana banjir. Karena juru bicara bertugas mulai dari mengumpulkan informasi, mengembangkan informasi dan menyebarkannya lewat media massa maupun media baru serta memberikan tanggapan terhadap topik yang menjadi perhatian masyarakat” (Wawancara Amin Surya Laga Komandan Batalyon

Marinir Pertahanan Pangkalan, 4 Juli 2022)

Selain itu juga tantangan yang terkait dengan aktivitas tanggung jawab sosial, peningkatan persepsi ataupun tantangan untuk mengatasi krisis. Diperlukan komunikasi strategis untuk menghadapi tantangan tersebut untuk meraih sumber daya sekaligus membangun legitimasi dan reputasi. Hubungan Masyarakat (Humas) adalah bagian yang lekat bahkan lebih dulu tampil mewarnai dunia komunikasi organisasi [20]. Humas pemerintah telah memiliki garis kebijakan yang jelas yang tertuang dalam tata perundangan, maupun dalam tugas pokok dan fungsi Humas di setiap Kementerian/Lembaga. Humas pemerintah adalah ujung tombak komunikasi. Mereka sebaiknya tidak hanya mengurus hal-hal teknis komunikasi, namun juga harus menguasai hal strategis terkait materi yang harus dikomunikasikan, termasuk memahami ilmu komunikasi massa, ekonomi politik media dan ilmu tentang persuasi [21].

Kata kunci dari tugas Humas pemerintah ialah sebagai komunikator untuk membantu terlaksananya program pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, mereka juga harus memiliki hubungan yang positif dengan berbagai kalangan. Selain itu, Humas harus memiliki konsep kerja yang terencana yang semuanya bermuara pada upaya untuk membentuk citra positif bagi lembaganya [22]. Tugas mengkomunikasikan bencana meliputi tiga hal pokok yakni menyampaikan informasi bencana, mendesain koordinasi komunikasi antar-elemen termasuk Kementerian/Lembaga dan pegiat kemanusiaan untuk menanggulangi bencana serta tugas untuk menangani media. Informan juga menjelaskan dalam wawancara bahwa komunikasi juga harus memperhatikan kejelasan dan ketepatan:

“Konsistensi Komunikasi dalam hal jalur Komando berjalan sesuai dengan Proskom (prosedur komunikasi) berdasarkan struktur organisasi Komando

di jajaran Lantamal III Jakarta. Adapaun informasi terjadinya bencana dapat bersumber dari entitas pemerintah namun untuk penerahan kekuatan dalam penanggulangan bencana berpedoman kepada perintah Danlantamal III Jakarta (Wawancara Kolonel Wijayanto Paban II Potensi Maritim Mabesal TNI AL, 7 Juli 2022).

Faktor Sumberdaya, Menurut wawancara dengan informan terkait dalam penanggulangan bencana banjir oleh Yonmarhanlan III Jakarta

“Kualitas *Staf/tenaga pelaksana* yang dimiliki Lantamal III cukup memadai dengan melaksanakan pembinaan fisik dan gladi Latihan penanganan bencana menggunakan cara memperagakan cara mengatasi masyarakat yang terdampak bencana yang harus dibantu terlebih dahulu, penanganan sementara dan mengevakuasi jarak terdekat serta kemampuan yang dimiliki yang dapat mendukung Implementasi Kebijakan Tugas Operasi Militer Selain Perang Penanggulangan Bencana di wilayah kerja Lantamal III. Kuantitas *Staf/tenaga pelaksana* terbatas namun Lantamal III mampu menyiapkan pasukan yang terdiri dari satu SSK Yonmarharlan III, satu SSK Denma Lantamal III dan satu SSK Satrol Lantamal III, standby sewaktu-waktu diperlukan untuk mendukung Implementasi Kebijakan Tugas Operasi Militer Selain Perang Penanggulangan Banjir dan konsisten melaksanakan koordinasi dengan instansi di dalam maupun di luar Lantamal III untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut” (Wawancara Letkol Laut (P) Joseph Marteen Perwira Staff Operasi Lantamal III Jakarta, 12 Juli 2022)

Keterbatasan kemampuan dan proporsi persebaran sumber daya manusia dan sarana/prasaran dalam Implementasi Kebijakan

Tugas Operasi Militer Selain Perang dalam Penanggulangan Banjir Di Yonmarhanlan III Jakarta masih belum mampu mengimbangi jumlah bobot dan kompleksitas permasalahan penanganan bencana banjir yang ada. Pada pelaksanaannya komposisi dalam Operasi Militer Perang (OMSP) dan Operasi Militer Selain Perang memiliki kesamaan susunan organisasi, dalam upaya tersebut dirasa akan mempengaruhi operasi militer perang sebenarnya karena segala sumberdayanya digunakan operasi militer selain perang dalam penanggulangan bencana banjir di Jakarta [23].

BNPB dan BPBD pastinya memiliki tujuan yang jelas dalam menanggulangi bencana. Perihal wilayah rawan banjir di Jakarta membuat isu ini tidak bisa terlepas dari pentingnya dinamika pengelolaan dan manajemen sumberdaya dikarenakan penanggulangan bencana juga membutuhkan *resource* dari Yonmarhanlan III Jakarta yang cukup besar. Hal tersebut berarti rencana yang terbentuk dalam manajemen sumberdaya untuk menghadapi isu ini mengarah kepada kepentingan OMSP dalam penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta. Rencana ini tercermin melalui kepentingan pemerintah daerah setempat melalui BNPB dan BPBD Provinsi DKI Jakarta [24].

Sesungguhnya pemerintah daerah setempat memiliki tanggung jawab yang tidak ringan, dituntut untuk mampu melahirkan inovasi kebijakan, terutama yang diarahkan untuk mendukung peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur, karena SDM aparatur merupakan “motor penggerak” dan “aktor utama” pelaksanaan kepentingan penanggulangan bencana. Peningkatan profesionalisme sumber daya (SDM) aparatur adalah satu hal yang sangat penting dan mendesak sehubungan dengan munculnya berbagai permasalahan di daerah, khususnya permasalahan sosial yang terus berkembang, searah dengan dinamika hubungan birokrasi. Kondisi ini dengan sendirinya membutuhkan penanganan dan pelayanan secara serius dan profesional. Dengan kata lain, penanganan ini

dapat efektif jika dilakukan oleh SDM aparatur yang berkompeteren dan profesional dalam bidang pekerjaan sosial, serta memiliki integritas pribadi yang tinggi [25].

Mencermati permasalahan yang ada serta untuk mengantisipasi berbagai tantangan ke depan, maka secara proaktif entitas penanggulangan bencana BPBD berupaya menangkap peluang-peluang yang ada sesuai dengan dinyatakan informan pada wawancara.

“Walaupun belum optimal, namun upaya BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan SDM aparatur profesional khususnya melalui pengadaan dan pengembangan sumber daya aparatur telah dilaksanakan secara bertahap, dengan harapan agar kebutuhan tenaga aparatur dapat terpenuhi dimasa yang akan datang, dalam rangka mempertahankan kepentingan penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta” (Wawancara Mohammad Insaf Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Provinsi DKI Jakarta, 18 Juli 2022).

Faktor Disposisi, Menurut Wawancara dengan Komandan Batalyon Yonmarhanlan III mengatakan

“Unsur dan satuan pelaksana Yonmarhanlan III Jakarta, BNPB dan BPBD harus tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya sesuai dengan kebijakan dan keputusan yang diambil pada level diatasnya. Tapi ketika unsur atau satuan pelaksana memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dari pengambil keputusan, maka proses pelaksanaan kebijakan menjadi jauh lebih rumit dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan” (Wawancara Amin Surya Laga Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan III Jakarta, 4 Juli 2022).

Mereka yang menerapkan kebijakan dalam banyak cara yang independen dari atasan nominalnya yang berpartisipasi langsung dalam keputusan kebijakan asli. Ini memperbesar ruang

gerak pelaksana, dan kemandirian memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan kebijaksanaan mereka, seperti halnya kurangnya komunikasi yang jelas dan konsisten. Berkaitan dengan efektivitas dan komitmen dalam penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta oleh Yonmarhanlan III Jakarta dalam wawancara dengan informan:

“Komitmen kinerja para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Ketika struktur birokrasinya juga tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan (Wawancara Kolonel Sugianto Paban II Potensi Maritim Mabesal TNI AL, 7 Juli 2022).

Yonmarhanlan III Jakarta merupakan salah satu Komando Utama yang berada dibawah TNI AL terus berpacu berbenah diri dalam rangka mewujudkan profesionalisme prajurit untuk dapat melaksanakan tupoksinya secara profesional, transparan dan akuntabel salah satunya dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi). Menindak lanjuti reformasi birokrasi di jajaran TNI AL dalam pelaksanaan program-program kerja, Yonmarhanlan III Jakarta sebagai salah satu Komando Pelaksana Korps Marinir perlu melakukan optimalisasi penataan dan penguatan organisasi dilingkungannya (Aryani et., al, 2021). Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Yonmarhanlan III Jakarta secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga menjadi tepat fungsi

dan tepat ukuran (right sizing) dengan sasaran menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal Yonmarhanlan III Jakarta, BNPB dan BPBD serta meningkatnya kapasitas entitas penanganan bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OMSP dalam penanggulangan banjir di Provinsi DKI Jakarta [27].

Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Tugas OMSP Dalam Penanggulangan Banjir Di Yonmarhanlan III Jakarta

Faktor pendukung Kerjasama sipil dan militer dalam manajemen penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta: (a) Sinergitas dan kerjasama entitas sipil dan militer yang semakin solid dan tanggap dalam bencana banjir. (b) Pemberdayaan sumberdaya Manusia seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan SDM di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tentang sinergitas dalam penanggulangan banjir. (c) Pendampingan misalnya perlindungan masyarakat dari dampak bencana dan pemulihan kondisi dari dampak bencana serta adanya pendampingan sosial bagi korban bencana banjir.

Faktor penghambat dalam manajemen bencana.. Peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan semua pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat Kerjasama sipil dan militer dalam penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta: (a) Komunikasi dan koordinasi antara entitas sipil dan militer (b) kendala anggaran dan operasional masih menggunakan sarana/prasarana tempur (c) Terbatas sarana angkut dan personil yang mengoperasikannya (d) pelatihan saat ini masih bersifat OMP belum dilatih simulasi OMSP penanganan bencana secara khusus serta belum optimal karena dilakukan secara umum dan bukan spesifik terkait kerawanan bencana di setiap daerah.

Berdasarkan kendala-kendala dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka dibutuhkan suatu kapasitas ataupun kemampuan Yonmarhanlan III yang handal dalam tugas penanggulangan bencana. Kapasitas

Yonmarhanlan III tersebut meliputi kesiapan personel, organisasi yang mempunyai kapabilitas dan sistem yang memadai sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada dalam penanggulangan bencana alam. Di tengah permasalahan yang kerap kali muncul seperti: anggaran, alat perlengkapan dan alat transportasi yang terbatas, maka peningkatan dan pengembangan kualitas personel TNI merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kapasitas TNI khususnya TNI AL dalam melaksanakan tugas perbantuan penanggulangan bencana. Seperti diketahui bahwa kejadian suatu bencana alam belum dapat diprediksi dan diketahui kapan dan dimana akan terjadi secara pasti, namun upaya mitigasi dan penyiapan menghadapi bencana dapat dilakukan sedini mungkin.

Dengan meningkatkan kemampuan personel TNI khususnya Yonmarhanlan III Jakarta dalam tugas penanggulangan bencana alam maka diharapkan semakin meningkatkan peran Yonmarhanlan III Jakarta dalam salah satu tugas OMSP yang diembannya. TNI khususnya Yonmarhanlan III Jakarta dituntut untuk selalu memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugas OMSP khususnya membantu penanggulangan bencana alam. Berkaitan dengan pelibatan Yonmarhanlan III Jakarta dalam penanganan bencana khususnya bencana banjir

KESIMPULAN

Sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik dua kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Yonmarhanlan III Jakarta merupakan salah satu satuan pelaksana yang berada dibawah TNI AL terus berpacu berbenah diri dalam rangka mewujudkan profesionalisme prajurit untuk dapat melaksanakan tupoksinya secara profesional, transparan dan akuntabel salah satunya dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi). Dalam pelaksanaan program-program kerja, Yonmarhanlan III Jakarta sebagai salah satu Komando Pelaksana Korps Marinir perlu melakukan optimalisasi penataan dan penguatan organisasi dilingkungannya. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Yonmarhanlan III Jakarta secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) dengan sasaran menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal Yonmarhanlan III Jakarta, BNPB dan BPBD serta meningkatnya kapasitas entitas penanganan bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OMSP dalam penanggulangan banjir di Provinsi DKI Jakarta.

2. Berdasarkan semua pernyataan ke tiga (3) informaan dari pihak sipil dan militer di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung Kerjasama sipil dan militer dalam manajemen penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta: (a) Sinergitas dan kerjasama entitas sipil dan militer yang semakin solid dan tanggap dalam bencana banjir. (b) Pemberdayaan sumberdaya Manusia seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan SDM di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tentang sinergitas dalam penanggulangan banjir. (c) Pendampingan misalnya perlindungan masyarakat dari dampak bencana dan pemulihan kondisi dari dampak bencana serta adanya pendampingan sosial bagi korban bencana banjir. Berdasarkan pernyataan diatas menjadi faktor penghambat dalam manajemen bencana. Peneliti menyimpulkan bahwa

berdasarkan semua pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat Kerjasama sipil dan militer dalam penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta: (a) Komunikasi dan koordinasi antara entitas sipil dan militer (b) kendala anggaran dan operasional masih menggunakan sarana/ prasarana tempur (c) Terbatas sarana angkut dan personil yang mengoperasikannya (d) pelatihan saat ini masih bersifat OMP belum dilatih simulasi OMSP penanganan bencana secara khusus serta belum optimal karena dilakukan secara umum dan bukan spesifik terkait kerawanan bencana di setiap daerah.

SARAN

Saran yang perlu ditindaklanjuti kedepannya adalah untuk menetapkan strategi dalam penanggulangan bencana mulai dari merumuskan legislasi terkait sinergi sipil dan militer, merumuskan prosedur tetap dalam penanggulangan bencana antara entitas sipil dan militer.

1. Untuk menyediakan anggaran khusus yang digunakan untuk mendanai aktifitas OMSP oleh Yonmarhanlan III dalam penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta.
2. BNPB, BPBD dan Yonmarhanlan III Jakarta semakin memperkuat sinergitas dengan melaksanakan pelatihan penanggulangan bersama antara entitas sipil dan militer.
3. Peneliti selanjutnya perlu mengembangkan penelitian ini dengan cara melibatkan stakeholder dari level kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi dan praktisi sebagai pihak yang menjadi sasaran penanggulangan bencana banjir. Agar memberikan gambaran secara lebih konkrit mengenai ketercapaian dari tujuan Implementasi Kebijakan Tugas Operasi Militer Selain Perang di

Yonmarhanlan III Dalam Penanggulangan Banjir Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kristiyono, S. Maarif, M. Adnan Madjid, and S. Staf Dan Komando Tni Angkatan Laut Jakarta, "Peran Nyata Pusat Hidro-Oseanografi Tni Angkatan Laut Dalam Penanggulangan Bencana the Indonesian Navy Hydro-Oceanographic Centre Real Role in Disaster Management," *J. Pertahanan Bela Negara*, vol. Vol 11 No, no. 1, 2021.
- [2] Pemprov DKI Jakarta, "Data Banjir DKI Jakarta Lintas Tahun 2014 - 2020," 2020. <https://pantaubanjir.jakarta.go.id/data-banjir-lintas-tahun> (accessed Jul. 12, 2022).
- [3] B. A. Nugraha, I. D. K. K. Widana, Wilopo, R. Hidayat, and S. K. Sakti, "Peran Pangkalan TNI AL Balikpapan Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Wilayah Kerjanya," *Nusant. J. Ilmu Pengetah. Sos.*, vol. 7, no. 2, pp. 352–360, 2020.
- [4] S. P. Nugroho, Suprpto, and T. S. Pandanwangi, "Kerjasama Sipil-Militer Dalam Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Tanggap Darurat Banjir Jakarta 2013, 2014, 2015)," *J. Dialog Penanggulangan Bencana*, vol. 7, no. 2, pp. 103–110, 2016.
- [5] A. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori Dan Aplikasi*, vol. 2, no. 9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- [6] A. D. Lukman Yudho Prakoso, "Implementation Study of Public Policies, Synergy of Policy for Defense Area and National Area Spatial in Grati Pasuruan," *Public Policy Adm. Res.*, 2019, doi: 10.7176/ppar/9-11-04.
- [7] G. C. Edwards, *Implementing Public Policy.*, vol. 98, no. 1. Texas: Congressional Quarterly Press, 1983.
- [8] I. Subiyantoro, "Selayang Pandang tentang Bencana," *J. Dialog Penanggulangan Bencana*, vol. 1 nomor 1, pp. 43–46, 2010.
- [9] W. D. Iwan *et al.*, *Mitigation emerges as major strategy for reducing losses caused by natural disasters board on natural disasters*, vol. 284, no. 5422. 1999.
- [10] Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*, vol. 113, no. 1. 2004, pp. 1–42.
- [11] R. S. Arto, L. Y. Prakoso, and D. Sianturi, "Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi," *Strateg. Pertahanan Laut*, vol. 5, no. 2, pp. 65–86, 2019.
- [12] T. Hermawan, L. Y. Prakoso, and D. Sianturi, "Strategi Pertahanan Laut dalam Analisa Dampak dan Upaya Pemerintah Mengamankan ALur Laut Kepulauan Indonesia," *Strateg. Pertahanan Laut*, vol. 6, no. 3, pp. 273–296, 2020.
- [13] Y. Listiyono, L. Y. Prakoso, and D. Sianturi, "Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia," *Strateg. Pertahanan Laut*, vol. 5, no. 3, pp. 103–116, 2019.
- [14] Nanto Nurhuda, J. Widjayanto, and L. Y. Prakoso, "Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paska Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia," *J. Inov. Penelit.*, vol. 1 No 11, no. April 2021, pp. 2523–2535, 2021, [Online]. Available: <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/516/433>.
- [15] S. Subekti, "Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan Tni Kepada Polri Di Wilayah Dki Jakarta Dalam Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Tugas Perbantuan Oleh Kodam Jaya," *J. Pertahanan Bela Negara*, vol. 4, no. 1, 2014, doi: 10.33172/jpbh.v4i1.320.
- [16] T. & dkk Yuwono, "RANCANG BANGUN DETEKSI DINI BAHAYA BANJIR. Seminar Nasional ke 8, pp.156–160," 2013.
- [17] J. W. Creswell and J. D. Creswell,

- Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.* Sage publications, 2017.
- [18] P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D.* Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- [19] A. Dipua, L. Y. Prakoso, and D. R. Nurdiansyah, "Analysis of Defense Strategy Policies in Dealing With the Potential Negative Impacts of the South China Sea Conflict," *J. Pertahanan Media Inf. ttg Kaji. Strateg. Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism Integr.*, vol. 7, no. 1, p. 89, 2021, doi: 10.33172/jp.v7i1.860.
- [20] N. M. Fortin and T. Lemieux, "Institutional Changes and Rising Wage Inequality: Is There a Linkage?," *J. Econ. Perspect.*, vol. 11, no. 2, pp. 75–96, 1997, doi: 10.1257/jep.11.2.75.
- [21] L. Y. Prakoso *et al.*, "Analysis Public Policy Of Defence Strategy," *J. Leg. Ethical Regul. Issues*, vol. 24, no. Special Issue 1, pp. 1–9, 2021.
- [22] R. Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.
- [23] A. Dipua, R. Hermawa, D. Puspitawati, N. Harahap, D. R. Nurdiansyah, and L. Y. Prakoso, "An Analysis Of The South China Sea Conflict: Indonesia's Perspectives, Contexts And Recommendations," *PalArch's J. Archaeol. Egypt/Egyptology*, vol. 17, no. 4, pp. 976–990, 2020.
- [24] E. Palupi *et al.*, "Sea Defense Strategy Strengthening Through Improving The Readiness of Indonesian Naval Vessel Crew (Study: The Health Office of 1st Fleet Command)," *J. Soc. Polit. Sci.*, vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.31014/aior.1991.04.01.266.
- [25] G. Salim *et al.*, "Analysis of allometric growth and condition index of tiger shrimp (*Penaeus monodon*) in Juata Laut Waters and Fishpond, Tarakan (Indonesia)," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 564, no. 1, 2020, doi: 10.1088/1755-1315/564/1/012010.
- [26] B. P. Iin Aryani Maria Susana Yudianti, Zainal Muhtar, Adib Hermawan, Lukman yudho Prakoso, "Description Moral Leadership of School, Based on Religion, Philosophy, Psychology, and Sociology. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 5(International Journal of Research and In), 253–256.," *Int. J. Res. Innov. Soc. Sci.*, 2021.
- [27] M. E. Junaidi and L. Y. Prakoso, "Pancasila as the Basis for Indonesia's Universal Defense," *J. Soc. Polit. Sci.*, vol. 4, no. 2, 2021, doi: 10.31014/aior.1991.04.02.283.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN